

ABSTRAK

PENERAPAN HUKUM DALAM KEBIJAKAN IMPOR BERAS KE DALAM NEGERI DI KAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI JO UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN

Bertambahnya penduduk Negara Indonesia yang sangat pesat membuat masalah lahan pertanian nyaris tak ada pada kota-kota besar karena semakin maraknya pembangunan industrialisme. Akibatnya pemerintah melakukan jalan pintas seperti mengimpor beras yang dalam kebijakan tersebut sangatlah merugikan para petani. Petani dirugikan karena pemerintah seakan tidak peduli pada usaha petani dalam penanaman beras pada lahan pertanian yang sangat terbatas ini. Kebijakan tersebut telah melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Metode penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan untuk memperoleh data primer, sekunder, dan tersier. Sifat penelitian adalah deskriptif analitis, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan pola pikir logika deduktif, yaitu pola pikir pengambilan kesimpulan dengan mengaitkan premis umum pada premis khusus.

Berdasarkan penelitian diperoleh hasil, Pertama: Kebijakan impor beras telah melanggar ketentuan Pasal 36 dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Kedua: Petani yang dirugikan dalam kebijakan impor beras semestinya dapat meminta perlindungan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Kata kunci: Kebijakan Pemerintah, Impor, Petani Beras.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF LAW IN POLICY OF RICE IMPORT IN STATE CONCERNING LAW NUMBER 19 OF 2013 CONCERNING EMPOWERMENT AND FARMER PROTECTION JUNCTO LAW NUMBER 18 OF 2012 CONCERNING FOOD

Increasing rapidly population of the State of Indonesia make the problems of agricultural land almost non-existent in big cities because of the rampant development of industrialism. As a result, the government made shortcuts such as importing rice which is in the policy was detrimental to all farmers. Farmers are disadvantaged because the government does not seem to care about they business in planting rice on this very limited agricultural land. The policy has violated Law Number 19 of 2013 concerning Farmer Protection and Empowerment and Law Number 18 of 2012 concerning Food.

This research method is normative juridical by using data collection, study literature is used in this study as a technique to obtain primary, secondary, and tertiary data. The nature of this research is descriptive analytic, the data analysis technique used in this legal research uses a deductive logic mindset, namely a concluding mindset by linking the general premise to a specific premise.

Based on the research results obtained, First: Rice import policy has violated the provisions of Article 36 and Article 39 of Law Number 18 of 2012 concerning food and Article 30 of Law Number 19 of 2013 concerning Farmer Protection and Empowerment. Second: Farmers who have been harmed in the rice import policy can in fact request protection in accordance with the provisions of Law No. 19 of 2013 concerning Farmer Protection and Empowerment.

Keywords: Government Policy, Imports, Rice Farmers.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERESETUJUAN PANITIA SIDANG	iii
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	12
E. Kerangka Pemikiran	12
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Penulisan	25

BAB II: PENGATURAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK SERTA PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

A. Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik.....	27
1. Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik Secara Umum.....	27
2. Pengertian Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik	28
3. Pengertian Pemerintah dan Pemerintahan.....	33
4. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai Asas Hukum.....	33
5. Konsep Asas-asas Umum Yang Baik Sebagai Kaidah Hukum	35
6. Perkembangan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik di Indonesia	36
7. Fungsi dan Arti Penting Adanya Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik	42
B. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	43
1. Pengertian Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	43
2. Tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.....	43
3. Perbedaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	44

BAB III: KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT IMPOR BERAS

A. Kebijakan Pemerintah Terhadap Impor Beras	47
B. Kebijakan Impor Bagi Petani Beras.....	59

BAB IV: PENERAPAN HUKUM KEGIATAN IMPOR BERAS KE DALAM NEGERI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19

TAHUN 2013 TENTANG PEMBERDAYAAN DAN
PERLINDUNGAN PETANI JO UNDANG-UNDANG NOMOR 18
TAHUN 2012 TENTANG PANGAN

A. Penerapan hukum terhadap kebijakan impor beras ke dalam negeri menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.....	67
B. Perlindungan hukum terhadap petani atas dampak dari impor beras yang merugikan petani dihubungkan dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	88
BAB V: PENUTUP	
A. Simpulan	97
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	101